

2025



# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**Kapanewon Purwosari**

📍 Jalan Raya Purwosari, Pefoyan, Dirifoto, Purwosari,  
Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, cO KodePos : 55373  
✉ Email : purwosari@gorontalo.go.id,  
🌐 Laman : https://purwosari.gorontalo.go.id



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Purwosari Kabupaten Gurungodul Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Purwosari Kabupaten Gurungodul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungannya ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Purwosari, Februari 2025

RANEWU,

SUBIYANTORO, SIP,  
NIP. 197202191991011001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Purwosari tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

### A. Capaian Tujuan

1. Tujuan 1 "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas"

Dengan target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2025 sebesar 79,60 dan capaian Tahun 2025 sebesar 97,19 maka tujuan tercapai sebesar 122,10%.

2. Tujuan 2 "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat"

Dengan target Jumlah Potensi Budaya lokal yang dilestarikan sebesar 2 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sebesar 2 potensi budaya maka tujuan sudah tercapai 100%.

### B. Capaian Sasaran

1. Capaian sasaran strategis 1 "Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat"

a. Diukur dengan indikator "Indeks Pelayanan Kapanewon"

b. Capaian indikator diukur didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibah Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

c. Target capaian indikator sasaran 1 di tahun 2025 sebesar 79,60 (sesuai rencana), tetapi sesuai perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 yakni 90,28. Dan sampai dengan bulan Desember 2025 terrealisasi 97,19. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 107,66 %.



- d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 90,28 terjadi peningkatan sebesar 7,65 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD".
    - a. Dukur dengan indikator "Nilai AKIP PD".
    - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 80,30. Untuk nilai AKIP 2025 belum keluar, masih dalam koreksi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sehingga Nilai AKIP Kapahewon Purwosari tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP 2024 sebesar 81,77. Persentase realisasi nilai AKIP tahun 2025 terhadap target mencapai 101,45%.
      - d. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,50 terjadi peningkatan sebesar 1,45%.
  3. Capaian sasaran strategis 3 "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan".
    - a. Dukur dengan indikator "Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Orestarkan".
    - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Kotatalaksanaan.
    - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 2 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 2. Dengan demikian kinerja Kapahewon Purwosari telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
      - d. Capaian tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100%.



Terdapat capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapalanjara Purwodadi ke depan, sebagai berikut:

1. Mempertahankan indikator kemiskinan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk kritis dan aktif dalam penyampaian gagasan yang bertujuan dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah .....	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	4
D. Tugas dan Fungsi .....	5
E. Permasalahan Utama (Strategic Issues) .....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	16
D. Pejalan Kinerja Tahun 2023 .....	18
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	23
B. Capaian Kinerja Lainnya .....	41
C. Efisiensi Anggaran .....	44
D. Inovasi .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Langkah Perbaikan Kinerja .....	50
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis kelamin dan Kompetensi .....	8
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	9
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025 .....	12
Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026 .....	15
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	18
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	16
Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	18
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 .....	18
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 .....	19
Tabel II.7 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Purwosari Tahun 2025 .....	20
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	24
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	25
Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat .....	25
Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran .....	26
Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2025 .....	27
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	27
Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat .....	28
Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	36
Tabel III.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	36
Tabel III.11 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAOP Tahun 2024 .....	36
Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2025 .....	36
Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	37



Tabel II.14 Capaian Kinerja Program Perwujudan Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	37
Tabel II.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	39
Tabel II.16 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat .....	39
Tabel II.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Rencana di tahun 2025 .....	30
Tabel II.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	40
Tabel II.19 Capaian Kinerja Program Perwujudan Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	40
Tabel II.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....	44
Tabel II.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja .....	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Purwoari Kabupaten Gunungkidul .....	8
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan .....	12
Gambar II.1. B-SAKIP .....	20
Gambar II.2. SIPANDA .....	21
Gambar II.3. GK-E PLAN 2.0 .....	21
Gambar II.4. SIPAKIK .....	21
Gambar II.5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik .....	22
Gambar III.1. Penyaluran Dropping Air Bersih .....	29
Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon, Sosialisasi Pelayanan Umum dan Konsultasi Publik, kerjasama program GPS Dukupili .....	30
Gambar III.3. Perumusan Musyawarah Kelurahan dalam menyusun RUPKot dan Membangun Kapanewon .....	31
Gambar III.4. Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, Kampung Siaga Bencana dan Penganjutan Nataru wilayah Kapanewon Purwoari .....	32
Gambar III.5. Fasilitas pembinaan Ketrampilan dan Keterampilan Umum .....	32
Gambar III.6. Fasilitas, pengawasan penyusunan dan asistensi APBD-Kal .....	33
Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam pentas Gelar Budaya .....	42
Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam distribusi bantuan air bersih .....	43
Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka .....	43
Gambar III.10. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan .....	43



**DAFTAR ISI**

- A. Latar Belakang
- B. Deskripsi Kinerja
- C. Matriks Kinerja, Peta Aliran, dan Struktur Organisasi
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Pemeliharaan Nama (su, Simbol)
- F. Anggaran 2025, Rencana-Perantara dan Anggaran

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor B/000.8.7.3/23/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Penyusunan LKIP PD Tahun 2025.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKJP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKJP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayikan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKJP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berikut tolak dari Renstra Kapanewon Purwosari Tahun 2021-2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKJP Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

## B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 - 2025. Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





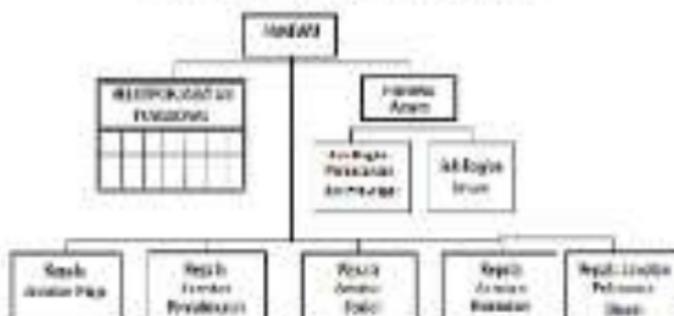
### C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kabupaten Puncak Kabupaten Gunungsiulu sebagaimana tertera dalam gambar berikut





### Struktur Organisasi Kapanewon Purwocari



Gambar 1.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Purwocari Kabupaten Gunungkidul

#### D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Purwocari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Gunungkidul Nomor Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kadudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

##### 1. Tugas Pokok

Kapanewon Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten;
- c. Penyusunan rencana kerja dan pedoman kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dibakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dikenal sebagai kabupaten;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Kabupaten di wilayah Kapanewon;



- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten.

#### E. Pemmasalahan Utama (Strategic Issue)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Purwosari Kabupaten Gurungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gurungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pemmasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Purwosari diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas, kompetensi maupun kuantitasnya mengakibatkan beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga dirasa masih kurang untuk bisa melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada. Dukungan anggaran yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai kinerja Kapanewon Purwosari secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kapanewon Purwosari Kabupaten Gurungkidul senantiasa berusaha melakukan koordinasi baik secara internal maupun dengan instansi terkait dari tingkat pusat maupun daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dinas antara lain adalah:

1. Peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan melalui keterlibatan dinas.



2. Kuantitas dan kualitas SDM yang merata dan memadai, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang;
3. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana;
4. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan yang strategis dan prioritas;
5. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi, Lembaga maupun Pemerintahan Kabupaten dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi

#### F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	Formal Kualifikasi			Pegawai yang ada Kualifikasi			Jenis Kelamin Laki Perempuan	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2
1	Unit Pimpinan								
	Panitia	1	1		1	1			1
2	Unit Pembantu (Tugas)								
	Sekretaris Lantai dan Sekretaris (Panitia) Asisten Subkegiatan/kegiatan	1	1		1	1		1	1
		0	4	2	2	8	2	1	1
3	Unit Pelaksana								
	Jawabansubstansi dan Staf	11	8	8	1	8	1	2	8
4	Kelompok Jabatan Fungsional								
	Jumlah	22	11	8	3	12	1	2	13

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Purwokaji per 31 Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Purwokaji Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (66,66%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (8,33%),



SLTA sebanyak 2 orang (16,66%), dan D3 sebanyak 1 orang (8,33%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun keberadaan pegawai perempuan 1 orang menduduki jabatan struktural dan 1 orang staf pelaksana menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Kaparewon Purworejo masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 4 orang staf pejabat pelaksana substantif dan 5 orang staf pejabat pelaksana administratif. Terdapat 1 orang pejabat struktural yang merangkap pelaksana tugas di jabatan pelayanan umum, 3 staf pegawai yang merangkap pada pelaksana administratif dan pelaksana substantif, kekurangan 1 pegawai yang tidak masuk dalam kualifikasi pelaksana administratif dan kekurangan 4 orang staf pada pelaksana substantif. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Kaparewon Purworejo Kabupaten Gunungkidul sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kaparewon Purworejo.

Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No	Kategori	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)
1	RUANG TITIP	20	952.000.000,00
2	PAKSI	2	0,00
3	... TIKAS	0	0,00
4	PERALATAN DAN MESIN	200	710.000.000,00
5	... JUKIT JUKIT/TON	10	300.000.000,00
6	... JUKIT KONTROL DAN KONTROL TANGKAI	100	100.000.000,00
7	... JUKIT KONTROL KONTROL DAN KONTROL	9	27.000.000,00
8	... JUKIT KONTROL DAN KONTROL	0	0,00
9	... JUKIT KONTROL	1	700.000,00
10	... KONTROL	20	107.000.000,00
11	... KONTROL DAN KONTROL	0	0,00
12	... KONTROL DAN KONTROL	1	10.000.000,00
13	... KONTROL DAN KONTROL	0	0,00
14	... KONTROL	1	10.000.000,00
15	... KONTROL DAN KONTROL	20	10.000.000,00
16	... KONTROL DAN KONTROL	0	0,00
17	... KONTROL DAN KONTROL	20	7.000.000,00

Sumber: Data Internal DP Desember 2022 (Unrevised)



Kendaraan dinas terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan operasional dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruang kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, aula, ruang pelayanan, ruang tamu, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlatan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan tan-tan sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computertaptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tepat, nyaman, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam PermenPANRB nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Fasilitas yang tersedia, antara lain:

- a. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Purwosari telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
  - Pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp (bidang miring), handrail (pegangan rambat), dan tersedia kursi roda bagi pengguna layanan yang membutuhkan;
  - Toilet belum terpisah untuk laki-laki dan perempuan namun sudah ada 1 toilet disabilitas yang mudah diakses;
  - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan;
- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses;
- c. Kawasan tanpa asap rokok dengan menyisihkan area merokok di luar ruang pelayanan;



- d. Sarana dan prasarana konsultasi/pengaduan/pemintaan informasi, baik secara langsung maupun secara online (PPID, kanal e-lapor, LaporkBup, maupun situs web kapanewon: <https://purwosari.gunungkidulkab.go.id>).
- e. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.





Gambar 1.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Purwodadi Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Kelangkaan Yogyakarta.

Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Eselon	Jenis	Uraian	Saluran	Saluran	Saluran	
			Rencana	Terdistribusi	terlindung	
			Rp.	Rp.	Rp.	
2		BELANJA DOKTER	1.726.000.000,00	1.427.000.000,00	(299.000.000,00)	
2	1	BELANJA DIPADAI	1.201.000.000,00	1.210.000.000,00	(9.000.000,00)	
2	1	1	Belang Pegawai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
2	1	2	Belang Barang dan Jasa	200.000.000,00	210.000.000,00	(10.000.000,00)
2	1	3	Belang Kersudatan	0,00	0,00	0,00
2	3	BELANJA BUDAYA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2	3	1	Belang Hibat Pesta dan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2	3	2	Belang Hibat Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja			1.726.000.000,00	1.427.000.000,00	(299.000.000,00)	
Total Surplus/Defisit			0,00	0,00	0,00	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Purwodadi Tahun 2025



Terlihat pada tabel 1.3. untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Purwodadi Kabupaten Gunungkidul semula Rp.1.726.001.063,52 dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.557.695.884,00 atau berkurang Rp.88.315.170,52. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian alokasi dana dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga target pencapaian pelaksanaan anggaran dapat maksimal.



**BAB II** berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPO
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Rencana Kinerja Tahun 2022
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Purwocari sebagai dokumen lektim operasional.

### **A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Purwocari Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Tercapai hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Purwocari Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas dan

Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.”

Adapun sasaran Kapanewon Purwocari Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel 8.1 Sasaran Strategis Kaparesean Purworejo Kabupaten  
 Gunungkidul, 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	INDIKATOR Kinerja	Sasaran	Sasaran 2021	TARGET SAMBUTAN					Target Akhir Rencana
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mengingat	Indeks Pelayanan Kabupaten	Desain	75	75,10	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00
2	Umpungnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai 3000 PD	Indeks	80	80,10 A	80,20 A	80,30 A	80,40 A	80,50 A	80,60 A
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Tolak Budaya Lokal Yang Didaftarkan	Prone Budaya	0	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2021-2026

#### u. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mengingat	Peningkatan kualitas pelayanan Kabupaten	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kabupaten
		Peningkatan kapasitas kabupaten dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta pengujian ketahanan dan ketahanan	Meningkatkan kapasitas kabupaten dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta pengujian ketahanan dan ketahanan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja untuk aktualisasi DOK	Meningkatkan koordinasi dan dukungan untuk PD
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



### C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kaparegowa Punwasdi Kabupaten Gurunggul tahun 2025 meliputi program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Salinan Pendanaan (Rp)	Salinan Pembelian (Rp)	Berkas/Bukti Belanja (Rp)
Pencapaian kinerja laporan tahunan sesuai target untuk meningkatkan mutu dan kredibilitas	PROGRAM FORTOLONGSARANA KECERDIKAWAN YOUTHWARRIOR USUDAS KECERDIKAWAN	44.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	Manajemen, Pelatihan dan Lembaga Swadaya	44.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	Jejak Kuda Jaja	44.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	PROGRAM FORTOLONGSARANA KECERDIKAWAN YOUTHWARRIOR USUDAS KECERDIKAWAN DAN KETATALAKSANAAN	44.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan	44.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	Peningkatan Rencana Program dan Kegiatan Kelembagaan	44.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan	PROGRAM FORTOLONGSARANA KECERDIKAWAN DAN DELAYEDAN FUDUB	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Penyusunan di Tingkat Kecamatan	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan dengan Peningkatan dan Penguatan Tim	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
	Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.711.000,00	11.711.000,00	11.711.000,00
PROGRAM KOORDINASI KECERDIKAWAN DAN KETATALAKSANAAN	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Penyusunan di Tingkat Kecamatan	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	
Peningkatan dan Penguatan Pelaksanaan yang Tidak Ditaksanakan oleh Tim Kerja	11.311.000,00	11.311.000,00	11.311.000,00	



Sektor	Program/Kategori/Sub-Kategori	Jumlah Terencana (Rp)	Jumlah Dana (Rp)	Sambutan Dibayar (Rp)
	Amalgam dengan keputihan gigi kaputit Indonesia serta kesehatan Indonesia dan negara sahabat di wilayah Kabupaten	1.211.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00
	Keputihan-keputihan dengan Tooth cap dan Tooth Implanter	10.000.000,00	9.880.000,00	980.000,00
	PROGRAM KONTROL DAN KAWAL PENCERITAAN BUKU	168.431.900,00	86.231.900,00	178.200.000,00
	Peningkatan & Sesi Pemahaman Jurnal Sains: Pengantar Biologi Sains	168.431.900,00	86.231.900,00	178.200.000,00
	Peningkatan wawasan masyarakat dan kegiatan budaya lokal untuk memajukan pariwisata Pasawati	89.281.900,00	89.200.000,00	17.280.000,00
	Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan Tahun Indonesia Tahun 2022, Sumatera Sumatra Tengah dan serta Perencanaan dan Pemeriksaan Keaktifan Kegiatan Keahlian Kegiatan Indonesia	10.000.000,00	8.280.000,00	17.880.000,00
	PROGRAM KEMERAKSIAN DAN KEMERAKSIAN PENCERITAAN BUKU	176.400.000,00	138.800.000,00	178.800.000,00
	Twibbon, Branding dan Kuiliasa/ Pembinaan dan Pengembangan Demokratisasi Desa	176.400.000,00	138.800.000,00	178.800.000,00
	Facilitas Perawatan Fasilitas desa dan jaringan keajaiban	1.100.000,00	8.800.000,00	980.000,00
	Facilitas Jaringan dan jernihan desa	1.770.000,00	1.070.000,00	170.000,00
	Facilitas Perawatan Keajaiban Desa dan Pembangunan Jati Desa	8.880.000,00	8.280.000,00	17.070.000,00
	Facilitas Perawatan keajaiban Desa dan jaringan desa	1.280.000,00	1.880.000,00	980.000,00
	Facilitas jaringan keajaiban dan jati desa Pembangunan Desa	1.000.000,00	1.700.000,00	980.000,00
	Perencanaan pembangunan dan jernihan jaringan Desa	1.000.000,00	1.880.000,00	970.000,00
	Facilitas Jaringan dan Perawatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Desa	88.270.000,00	88.180.000,00	10.810.000,00
	Facilitas Peningkatan keaktifan dan keaktifan Desa	38.700.000,00	31.770.000,00	40.000.000,00
Total Anggaran yang Berjalan Lampaui dengan Realisasi Sektor		171.207.400,00	278.971.600,00	301.980.000,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Kabupaten  
Bogor Tahun 2022



Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Seluruh Realisasi (Rp)	Seluruh Terpenuhi (Rp)	Demografi Bakuwal (Rp)
1	PROGRAM KONSOLIDASI STRUKTUR KEMENTERIAN SASARAN KADUWAT/BERKOTA	1.221.132.132,00	1.221.012.801,00	21.179.330,16
2	Penanganan, Perancangan, dan Binaan Khasa Perangin Derasi	11.201.200,00	7.431.200,00	11.201.200,00
3	Salinisasi Kandang Perangin Derasi	1.221.881.211,00	1.220.227.281,00	20.112.800,00
4	Salinisasi Hapjakaan Perangin Derasi	20.179.800,00	20.888.800,00	(30.000,00)
5	Salinisasi Urug Perangin Derasi	21.888.187,00	20.212.187,16	11.812.889,00
6	Perbaikan Bawang Putih Derasi Perangin Derasi Perangin Derasi	11.224.800,00	11.224.800,00	-
7	Penyediaan Jasa Perangin Derasi Perangin Derasi	21.888.188,00	21.888.188,00	-
8	Perawatan Bawang Putih Derasi Perangin Derasi Perangin Derasi	20.221.889,00	20.711.889,00,00	100.000,00
	Jumlah	1.221.132.132,00	1.221.012.801,00	21.179.330,16

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pembantu Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Purwokerto Tahun 2023

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Purwokari Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja Instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kapanewon Purwokari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon	Indeks	75,60
2.	Pelayanan sesuai ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Jumlah orang budaya lokal yang diajarkan	Orang	2



NO	SASARAN (MATERI)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul	Indeks Pelayanan Kabupaten	Indeks	70,80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,40 (A)
3.	Pelaksanaan Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dicatat	Potensi	3

Pada tahun 2025, Kabupaten Purwosari melaksanakan revisi perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan target kinerja, realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Purwosari  
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Torintuative Penyelenggaraan Pelayanan Kabupaten yang berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kabupaten	Indeks	70,80
2.	Pelaksanaan potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Jumlah potensi budaya lokal yang dicatat	Potensi	3

NO	SASARAN (MATERI)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul	Indeks Pelayanan Kabupaten	Indeks	80,80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,80
3.	Pelaksanaan Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dicatat	Potensi	3

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:



Tabel 1.7 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Capaian Kinerja  
 Purworejo Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Kategori
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDUKURAN	35.000.000,00	DAIS
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN YOGYAKARTA URUSAN KEMERDEKAAN DAN KEPATALAKSANAAN	35.000.000,00	DAIS
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN PURWOREJO	1.278.812.064,00	APSD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.108.000,00	APSD
5	PROGRAM PENYERBUTANAN MANDIRI DAN KELURAHAN	48.100.000,00	APSD
6	PROGRAM COORDINASI KEMERDEKAAN DAN KEMERDEKAAN URUSAN	12.000.000,00	APSD
7	PROGRAM PENGEMBANGAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN	90.000.000,00	APSD
8	PROGRAM PENYERBUTANAN DAN PENYERBUTANAN MANDIRI	138.000.000,00	APSD

Sumber: Dokumen Anggaran Kinerja Kabupaten Purworejo 2025

**Keterangan Tambahan:**

1. Indikator kinerja tidak berubah, tetapi target kinerja naik meskipun volume anggaran berkurang 3,95% sehingga adanya penyesuaian perubahan anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada divisi IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

**e. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP ([e-gov.gunungkidulkab.go.id](http://e-gov.gunungkidulkab.go.id))



Gambar 1.1 E-SAKIP

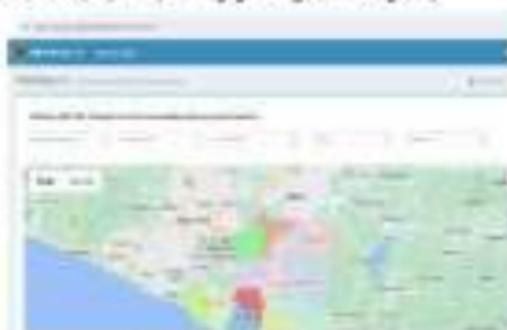


2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SIPANDA) (<https://sipanda.gurungkidukab.go.id>)



Gambar 3.2. SIPANDA

3. GK- E PLAN 2.0 (<https://eplan-ng.gurungkidukab.go.id>)



Gambar 3.3. GK- E PLAN 2.0

4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gurungkidul (SIPAKGK) (<https://sipakgk.gurungkidukab.go.id/>)



Gambar 3.4. SIPAKGK



5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik  
(<https://sidaa.com.jogja.go.id/sita/beranda/>)



Gambar 5.5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik



- ZAD (3) bentuk
- Capaian Kinerja Tahun 2025
  - Capaian Kinerja Lainnya
  - Realisasi Anggaran
  - Index

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon Purwodadi Kabupaten Gurungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Purwodadi Kabupaten Gurungkidul dengan Bupati Gurungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 - 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 - 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 - 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 - 65	Rendah	Kuning Muda
5.	< 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri 08 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SIFAT	2024		2025			SIFAT	TARICAH
				UPTD	UPTD	TARGET	REALISASI	PERKURAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kepuasan Kapanewon	Kuantitatif	62,70	62,58	79,60	97,19	122,10%	Sangat Tinggi	60
1	Demokratisasi dan transparansi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Kapanewon	Kuantitatif	62,70	62,58	82,28	97,19	107,68%	Sangat Tinggi	60
2	Penyediaan layanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Kapanewon	Kuantitatif	79,60	87,77	82,60	97,77	117,68%	Sangat Tinggi	60,00
1	Pelayanan Publik Raguin Sektor Lada (Lada Meringkal dan Meringkat) Dengan Berkualitas	Jumlah Pribadi Sektor Lada Yang Diakses	Kuantitatif	-	2	2	2	100%	Sangat Tinggi	2
2	Pelayanan Publik Raguin Sektor Lada (Lada Meringkal dan Meringkat) Berkualitas	Jumlah Pribadi Sektor Lada Yang Diakses	Kuantitatif	-	2	2	2	100%	Sangat Tinggi	2

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Kapanewon Purwosari menggunakan indikator kinerja yang sama. Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan dan sasaran, sehingga capaian sasaran strategis secara langsung merefleksikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas ini didukung dengan 2 sasaran yaitu kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meringkal dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja dengan indikator kinerja indeks kualitas Pelayanan Kapanewon. Dengan Tahun 2025 sebesar 79,60 dan capaian Tahun 2025 sebesar 97,19 maka tujuan tercapai sebesar 122,10%. Pengukuran tujuan dan sasaran yaitu kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meringkal menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Purwosari dianalisis secara terpadu.

#### Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meringkal

Kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meringkal diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formula Pembungan

No.	Sasaran	Indikator	Mula Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kaparewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kaparewon	<p>Indeks Pelayanan Kaparewon merupakan nilai jumlah dan bobotnya pelayanan yang diberikan Kaparewon Purwadara kepada masyarakat</p> $I = (20\% \times \text{persentase penyusunan APBD/kelembagaan dan legalitas}) + (20\% \times \text{persentase penyusunan APBD/kelembagaan dan legalitas}) + (20\% \times \text{persentase RK makin yang lengkap}) + (20\% \times \text{persentase perjanjian kerjasama dan keabsahan umum}) + (20\% \times \text{nilai indeks layanan masyarakat})$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyusunan APBD/kelembagaan dan legalitas = <math>\frac{I - \text{Nilai yang harusnya APBD/kelembagaan dan legalitas}}{\text{Jumlah nilai}} \times 100\%</math> Yang dimaksud dengan legalitas adalah APBD/kelembagaan akan dilaksanakan yang berlaku hingga 31 Desember Tahun t</li> <li>Persentase penyusunan APBD/kelembagaan dan legalitas = <math>\frac{I - \text{Nilai yang harusnya APBD/kelembagaan dan legalitas}}{\text{Jumlah nilai}} \times 100\%</math> Yang dimaksud dengan legalitas adalah APBD/kelembagaan akan dilaksanakan yang berlaku sejak bulan Desember Tahun t</li> <li>Persentase RK makin yang lengkap = <math>\frac{I - \text{Nilai yang harusnya RK makin}}{\text{Jumlah nilai}} \times 100\%</math></li> <li>Persentase perjanjian kerjasama dan keabsahan umum = <math>\frac{I - \text{Nilai perjanjian kerjasama dan keabsahan umum}}{\text{Jumlah perjanjian kerjasama dan keabsahan umum}} \times 100\%</math></li> <li>Nilai indeks layanan masyarakat = merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang menerima pelayanan di Kaparewon Purwadara</li> </ul>

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran  
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kaparewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kaparewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kaparewon	90,20	97,19	107,65	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 107,65%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 97,19 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90,20 dimana target tersebut merupakan target Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Rincian jumlah meta indikator sasaran yang tercapai pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran

No.	Kategori	Perencanaan (RPRA)	Perencanaan (RKPRA)	KK (Kilometer Terjangkau) (maksudnya jumlah)	Tingkat Realisasi (Kilometer Terjangkau) (Realisasi)	Penyangan (kemampuan dan layanan)
1	Diripurna	10000 m <sup>3</sup>	10000 m <sup>3</sup>	2.422	2.422	100%
2	Giripurna	10000 m <sup>3</sup>	10000 m <sup>3</sup>	355	355	100%
3	Girihayu	10000 m <sup>3</sup>	10000 m <sup>3</sup>	-	-	100%
4	Girihayu	10000 m <sup>3</sup>	10000 m <sup>3</sup>	-	-	100%
5	Sentra	10000 m <sup>3</sup>	10000 m <sup>3</sup>	-	-	100%

Dari data tersebut Penyusunan ABRKai dan Penyusunan RKPRAi pada Kelurahan di Kapanewon Purwosari terlaksana tepat waktu sedangkan realisasi terhadap target KK tidak tercapai sepenuhnya dimana data tersebut bersumber pada kegiatan penerimaan bantuan dropping air bersih berdampak kekeringan di Kelurahan Giripurno (262 tanki) dan Girihayu (138 tanki) total sejumlah 400 Tanki untuk 3.283 KK pemantau yang terakomodir dalam Program Kegiatan OPA Kapanewon Purwosari. Sedangkan dalam penanganan keluhan di Kapanewon Purwosari tidak ada kasus yang tidak terselesaikan.

Mata indikator lain yang digunakan dalam pengukuran indeks Pelayanan Kapanewon adalah hasil akhir penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon Purwosari pada tahun 2025 tercapai 85,94. Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 5 unit pelayanan yaitu persyarafan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, informasi pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Realisasi kinerja sebesar 87,19 pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,91 atau 7,65% jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 80,28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Rencana di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 8.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 serta perbandingan dengan target akhir Rencana di tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Rencana	Capaian di 2025 (Tertarget %)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapabilitas Masyarakat	85,70	85,17	84,12	83,28	87,10	80	101,48

Dari evaluasi data tersebut dapat terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Pencapaian target sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Meningkatkan didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenagahan dan Keterlibatan Umum;
- 4) Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 8.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja (Output)	Metrik Indikator
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (PSP)	$\text{Kualitas} = \frac{[\text{Nilai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (PSP)}]}{[\text{Target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (PSP)}]}$ x 100 Tertarget jika >= 100%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penilaian Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PBM)	$\text{Kualitas} = \frac{[\text{Nilai Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PBM)}]}{[\text{Target Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PBM)}]}$ x 100 Tertarget jika >= 100%



No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Nilai Indikator
		Program Koordinasi, Koordinasi dan Kelembagaan Umum	Penerapan Program Koordinasi, Koordinasi dan Kelembagaan Umum, terlembaga	Kualitas [1]Nilai Kapasitansi Koordinasi dan Kelembagaan Umum terlembaga [2]Target Kapasitansi Koordinasi dan Kelembagaan Umum terlembaga Target dan Terpenuhi!
		Program Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Umum	Penerapan Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Umum yang terlembaga	Kualitas [1]Nilai Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Umum yang terlembaga [2]Target Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Umum yang terlembaga Target dan Terpenuhi!
		Program Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penerapan Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlembaga	Kualitas [1]Nilai Kapasitansi Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlembaga [2]Target Kapasitansi Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlembaga Target dan Terpenuhi!

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersaji dalam berikut:

Tabel III.5 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Angka Tahun 2022 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Capaian Meningkat	Indeks Keluasan Kapanewon	11,62	Program Koordinasi Pemerintahan dan Kelembagaan Umum	Penerapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Umum terlembaga	100	100	100 Sangat Tinggi
			1. Program Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlembaga	Penerapan Kapasitansi Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlembaga	100	100	100 Sangat Tinggi
			2. Program Koordinasi, Koordinasi dan Kelembagaan Umum	Penerapan Program Koordinasi, Koordinasi dan Kelembagaan Umum terlembaga	100	100	100 Sangat Tinggi
			3. Program Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Umum	Penerapan Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Umum yang terlembaga	100	100	100 Sangat Tinggi
			4. Program Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penerapan Perencanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlembaga	100	100	100 Sangat Tinggi
Jumlah Capaian Kinerja Per Program					100	100	100 Sangat Tinggi



Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keterangan capaian indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat tersebut ditukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Penyialuran Dropping Air Bersih terdapat Kekeringan Tahun 2023



Gambar 10.1. Penyialuran Dropping Air Bersih

- b. Pelayanan Umum Kapanewon, Sosialisasi dan pembuatan identitas Kepanudukan Digital, Rapat Koordinasi Pelayanan Umum, Perjanjian Kerjasama Kelurahan dan pelaksanaan Gerakan Rambu Sungkoro (GRS) penyerahan akte kematian pada saat upacara pemberangkatan jenazah oleh Lurah kepada keluarga anamum.



Gambar III.2. Pelayanan Umur Kapanewon. Sosialisasi Pelayanan Umum & Konsultasi Publik, kerjasama program GPB Dukcapil

2. Evaluasi Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Perumusan Musyawarah Kelurahan dalam menyusun RKP/Kel dan Murenbang Kapanewon





Gambar II.3. Permusatan Musyawarah Kelurahan dalam menyusun RKP/Kal dan Musrenbang Kapanewon

3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Kelermbaan dan Keterlibatan Umum
  - a. Kegiatan Kelurahan Taroguh Berencana, Kampung Siaga Berencana dan Pengamanan Nataru wilayah Kapanewon Purworejo





Gambar III.4. Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, Kampung Siaga Bencana dan Pengamanan Nataru wilayah Kaplayogdi Purwodadi

4. Evaluasi Capaian Program Program penysanggarkan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Memfasilitasi pembinaan Ketenraman dan Ketertiban Umum (penyakit masyarakat dan mitigasi bencana)



Gambar III.5. Fasilitas pembinaan Ketenraman dan Ketertiban Umum



## 5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### a. Fasilitas dan pengawasan penyusunan APBDkal Asistensi APBDkal



Gambar II.6. Fasilitas, pengawasan penyusunan dan asistensi APBDkal

#### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Purworejo Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pada Tingkat Kapanewon maupun kaurahan sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal.
2. Peraturan atau dasar penyusunan APBDkal bersifat mendasar.
3. Penyusunan APBDkal kurang maksimal karena setelah ditetapkan masih ada program wajib yang harus dilaksanakan.
4. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BMDA, meski antara pusat dan daerah serta realita lapangan.
5. Indikator kemiskinan sering berubah/ kriteria penerima bantuan berubah.



Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem manajemen kinerja untuk memastikan setiap staf dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Berkordinasi dengan pihak terkait mengenai bagaimana penyusunan APBDK, RKPKK dapat terlusun dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak dan meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring.
4. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta konsultasi dengan pihak terkait.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Adanya kepemimpinan yang efektif dan berkualitas di tingkat kaparewon, yang mampu memberikan arahan, visi, dan memotivasi aparatur serta masyarakat.
2. Aktifnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Terjalannya koordinasi dan konsultasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah di tingkat kaparewon, kabupaten maupun pusat.
4. Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai
5. Adanya kontrol secara internal di Kaparewon Purworejo
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
7. Peran aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

#### Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Perjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel 8.9 Rumusan Indikator dan Formula Pembungan

Sasaran	Indikator	Mula Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kabupaten Purwokerto Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir perhitungan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan kinerja bobot 12%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 28%. Implementasi SKB: Predikat AA (Nilai >80-100) Predikat A (Nilai >60-80) Predikat BB (Nilai >70-60) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel 8.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,00	81,77	101,45	Sangat Tinggi

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2023 ditargetkan sebesar 80,00, dan sampai laporan ini dibuat, Nilai AKIP tahun 2023 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2023 masih menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024\*.

Dalam LHE AKIP juga terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Panewu Purwokerto. Dan, untuk perbaikan di implementasi SA/OP di Kapanewon Purwokerto, saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Purwokerto. Saran, rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Purwokerto adalah sebagai berikut:



Tabel 18.11 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SA/OP Tahun 2024

No	Kategori	Detail	Rekomendasi	Tindakan Tindak lanjut
1	Kelembagaan	Terdapat yang dianggap dapat memberikan imajinasi pada aspek strategi untuk mencapai kualitas kerja PD yang meningkat	Memastikan seluruh jajaran pemerintahan untuk memiliki komitmen yang dapat dapat memberikan imajinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja pada proses pelayanan masyarakat	Harus dibarengi dengan sosialisasi
2	Regulasi	1. Data yang dapat diolah menjadi laporan yang akurat dan tepat yang dapat digunakan 2. Target yang belum terpenuhi sehingga perlu peninjauan yang dilakukan	Memastikan keakuratan data yang ada dan melakukan evaluasi yang dapat menjadi acuan yang dapat dapat digunakan	Harus dibarengi dengan sosialisasi
3	Kelembagaan	1. Dokumentasi yang akan menginformasikan pelaksanaan kerja yang dapat dapat akurat 2. Target yang belum terpenuhi sehingga perlu peninjauan yang dilakukan	Memastikan keakuratan data yang ada dan melakukan evaluasi yang dapat menjadi acuan yang dapat digunakan	Harus dibarengi dengan sosialisasi
4	Kelembagaan	Terdapat yang dapat memberikan imajinasi pada aspek strategi untuk mencapai kualitas kerja PD yang meningkat	Memastikan keakuratan data yang ada dan melakukan evaluasi yang dapat menjadi acuan yang dapat digunakan	-

Tabel 18.12 Pertandingan prestasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Rencana di tahun 2026

Daerah	Indikator Kinerja	Prestasi Kinerja				Target Akhir Rencana (2026)	Capaian awal 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Kabupaten Purworejo	Aspek ACP PD	79,50	80,80	81,00	81,11	80,50	101,21



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 70,50 (B), tahun 2023 terealisasi 80,60 (A), tahun 2024 terealisasi 81,05 (A) dan tahun 2025 terealisasi 81,77 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Rumusan indikator dan cara penghitungannya:

Tabel 18.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Penghitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Metrik Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	<p>Rumus:</p> <p><math>\frac{\text{Jumlah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100</math></p> <p>Target: 100 %</p>

Tabel 18.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) / Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Kemudahan capaian indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Purworejo Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Sisa anggaran tahun 2023 merupakan belanja wajib yang tidak dapat terserap optimal karena dianggarkan lebih karena untuk mengantisipasi kekurangan pembiayaan.
  2. Kurangnya SDM pelaksana administrasi.
  3. PPTK kurang optimal dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
- Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berkordinasi dengan perencanaan agar kebutuhan pembiayaan belanja wajib lebih optimal.
2. Optimalisasi SDM yang ada.
3. Pengguna Anggaran dan PPK melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai;
2. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik intern kapanewon.

#### Tujuan 2: Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi



kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Purworejo diarahkan secara terpadu dengan capaian sasaran strategi secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

**Sasaran 3 : Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan**

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Diastakan. Perjasaan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel II.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Diastakan	Jumlah potensi budaya yang ada dan masih diastakan di Kabupaten

Tabel II.16 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Sangat Tinggi
		Target (Realisasi)	Capaian (%)	Nilai	
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Diastakan	2	2	100	

Dari data tersebut dapat terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 2 terrealisasi sebesar 2 sehingga realisasi kerjanya 100% masuk dalam kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja tahun 2025 atau 100% sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022, 2023, dan 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam table berikut.

Tabel II.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Diastakan	2	2	2	2	2	2	100



Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Asesmen/Perhitungan Formulasi
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Program Penyelenggaraan Kelestarian Topografi Uluat Kebudayaan	Pelestarian penyelenggaraan kelestarian Topografi uluat kebudayaan	Rumus: $\frac{\text{[Jumlah kegiatan penyelenggaraan kelestarian Topografi uluat kebudayaan wilayah]}}{\text{[Target kegiatan penyelenggaraan kelestarian Topografi uluat kebudayaan wilayah]}} \times 100$ Tertinggi, Terendah!
		Program Penyelenggaraan Kelestarian Topografi Uluat Kelestarian dan Kelembagaan	Pelestarian Program Penyelenggaraan Kelestarian Topografi Uluat Kelestarian dan Kelembagaan	Rumus: $\frac{\text{[Jumlah kegiatan penyelenggaraan kelestarian Topografi uluat Kelestarian dan Kelembagaan wilayah]}}{\text{[Target kegiatan penyelenggaraan kelestarian Topografi uluat Kelestarian dan Kelembagaan wilayah]}} \times 100$ Tertinggi, Terendah!

Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja tahun 2022 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Diestimasikan	100	Program Penyelenggaraan Kelestarian Topografi Uluat Kebudayaan	Pelestarian penyelenggaraan kelestarian Topografi uluat kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan Kelestarian Topografi Uluat Kelestarian dan Kelembagaan	Pelestarian Program Penyelenggaraan Kelestarian Topografi Uluat Kelestarian dan Kelembagaan	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian indikator program pada sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat tersebut didukung dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Kelestarian Yogyakarta Urusan Kebudayaan s. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Kelestarian Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan



a. Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

**Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Purwocari antara lain:

- a. Durasi waktu lampi terbatas
- b. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan merugikan proses tahapan untuk mempertahankannya.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertajam konsep perencanaan terkait gear budaya
- b. Aktif konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan pihak-pihak terkait.

**Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. koordinasi dan kerjasama yang efektif antara para pemangku kepentingan dan masyarakat
- b. aktif berkonsultasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait.

**B. Capaian Kinerja Lainnya**

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Purwocari meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Purwocari pada tahun 2023 adalah program/kegiatan yang terkait dengan penganusutamaan gender dalam pembangunan.

**Capaian Kinerja terkait dengan Penganusutamaan Gender dalam Pembangunan**

Perspektif penganusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan baik meliputi kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain penganusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Purwocari. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan penganusutamaan gender, dimana sasaran dan



perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh dibatasi apalagi mengabaikan aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Purwosari. Afirmatif gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statement) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Peningkatan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Purwosari).

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Purwosari :

1. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pelestarian budaya, termasuk melalui media sosial dan acara komunitas.



Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam pentas Gelar Budaya



2. Memastikan prosedur distribusi bantuan air bersih melibatkan perempuan dan mempertimbangkan waktu serta cara mereka mengakses air;



Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam distribusi bantuan air bersih

3. Menerapkan sistem seleksi yang transparan dan terbuka untuk semua calon anggota Paksi/traka, tanpa diskriminasi gender



Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dalam Paksi/traka

4. Meningkatkan kapasitas dan melibatkan secara aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan



Gambar III.10. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan



### C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Purworejo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/3/7.01.0.00.0.00.18.0000/001/2023 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.657.605.804,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp1.406.472.440,00 atau 84,85%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.133.364,00.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 18.20 berikut.

Tabel 18.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ekspansi (%)	Sisa (Rp)	Therapan (%)
1	PROGRAM KEGIYELDINGGARAHAN KESTERAWAAN YOGYAKARTA LINGKAR KEBUDAYAAN	22.000.000,00	22.000.000,00	100	-	-
-	Ukui, Seni, Tradisi dan Lanskap Budaya	22.000.000,00	22.000.000,00	100	-	-
2	PROGRAM KEGIYELDINGGARAHAN KESTERAWAAN YOGYAKARTA LINGKAR KELOMPOK/AGAMA DAN KETVILKELINGGAHAN	22.070.000,00	22.070.000,00	100	-	-
-	Darussalam dan Tanggapan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul	22.070.000,00	22.070.000,00	100	-	-
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS	1.275.790.000,00	1.033.330.340,00	80,99	242.459.660,00	79,99
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	0,00	100,00
-	Saliprisasi dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1.228.000.000,00	963.148.799,00	77,98	304.851.201,00	77,97
-	Saliprisasi dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	31.390.000,00	32.881.541,00	104,75	-1.491.541,00	104,75
-	Saliprisasi untuk Kegiatan Daerah	16.375.000,00	16.375.000,00	100,00	0,00	100,00
-	Pengadaan Barang/Jasa Daerah	11.015.000,00	11.406.541,00	103,50	-391.541,00	103,49
-	Penyediaan Jasa Perantara Usaha/Perdagangan Daerah	27.015.000,00	16.506.541,00	60,92	1.048.459,00	60,92
-	Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	66.700.000,00	66.622.000,00	100,00	78.000,00	100,00
-	Pengadaan Barang/Jasa Daerah	11.015.000,00	11.406.541,00	103,50	-391.541,00	103,49
4	PROGRAM KEGIYELDINGGARAHAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS PUBLIK	28.790.000,00	27.870.000,00	96,80	920.000,00	97,24
-	Koordinasi dan pengawasan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.140.000,00	101,40	-140.000,00	101,40



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Deviasi (%)
2	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Birokratisasi dan Uji Negeri Pasca-Debit (UPTD) dan E-Governance	4.420.000,00	4.420.000,00	100	0,00	-
3	Program KEMERDEKAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.790.000,00	41.790.000,00	100	0,00	-
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.280.000,00	31.280.000,00	100	0,00	-
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.280.000,00	31.280.000,00	100	0,00	-
6	Program Koordinasi KEMERDEKAAN DAN KETERTANGAN URBAN	11.260.000,00	11.260.000,00	100	0,00	-
7	Koordinasi Ujara Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Urusan	11.260.000,00	11.260.000,00	100	0,00	-
8	Program KEMERDEKAAN URBAN DAN KEMERDEKAAN DESA	89.020.000,00	89.020.000,00	89,78	100.000,00	0,11
9	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Birokratisasi dan Uji Negeri Pasca-Debit (UPTD) dan E-Governance	89.020.000,00	89.020.000,00	89,78	100.000,00	0,11
10	Program KEMERDEKAAN DAN KEMERDEKAAN DESA	133.830.000,00	133.830.000,00	87,33	1.820.000,00	1,37
11	Realisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Tergesernya Pelaksanaan Desa	133.830.000,00	133.830.000,00	87,33	1.820.000,00	1,37
<b>Jumlah</b>		<b>1.127.963.894,00</b>	<b>1.101.471.000,00</b>	<b>97,65</b>	<b>26.492.894,00</b>	<b>2,35</b>

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Aka Rekening

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dibelanjakan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 81.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis Pemenuhan	Rencana			Anggaran		
		Tipe	Target	% Realisasi	Rp. Rp.	Target Rp.	% Realisasi
1.	Peningkatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	0,00	0,00	0,00	221.221.000,00	214.124.000,00	96,84
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	0,00	0,00	0,00	1.273.703.000,00	1.222.228.000,00	95,98
3.	Pelaksanaan Program Ragna Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	0	0	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100
<b>Jumlah Belanja Total</b>					<b>1.527.924.000,00</b>	<b>1.469.352.000,00</b>	<b>96,18</b>
<b>Jumlah Belanja Program Utama (1-3)</b>					<b>1.273.703.000,00</b>	<b>1.215.228.000,00</b>	<b>95,40</b>
<b>Jumlah Belanja Program Pelukung (4)</b>					<b>254.221.000,00</b>	<b>254.124.000,00</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Siskegop dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Semester 2025

\*) Nilai LRAIP tahun 2024



Berdasarkan tabel III.21 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Purwocati Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.657.665.664,00 terealisasi Rp1.426.472.400,00 atau 84,85% sehingga dapat dikatakan terdapat efelensi Rp231.213.444,00 atau 15,15% yang bersumber dari:

- Sisa Belanja Gaji ASN
- Sisa Pembayaran JKN Non PNS dan Jasa transaksi keuangan
- Sisa Pengadaan barang dan jasa
- Sisa Belanja Modal (penawaran harga)
- Sisa Pembayaran Tagihan Rekening Air dan Listrik
- Sisa Pembayaran Pajak Kendaran Dinas
- Sisa Belanja Pemeliharaan Ratah Godung (penawaran harga)
- Sisa Belanja Pengadaan Pakelan Dinas Pasiklora (penawaran harga)
- Sisa Belanja Dropping Air (penawaran harga)
- Sisa Belanja Jasa Tenaga Administrasi / Lipah THL

#### D. Inovasi

---

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemacu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan layanan google drive untuk percepatan komunikasi, informasi dan rekapitulasi pengambilan data masing-masing jabatan.
2. Pemanfaatan media WhatsApp Group (WAG) pada instansi di lingkup Kapanewon Purwocati. Manfaat WAG diantaranya untuk meningkatkan



efisiensi komunikasi, memfasilitasi kolaborasi, meningkatkan komunikasi internal, mempermudah komunikasi dan memperlebar informasi.

3. Pemanfaatan media sosial (seperti Instagram dan TikTok) serta website OPD sebagai alat komunikasi dan penyakuran informasi dengan masyarakat sehingga mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital untuk pengumpulan masukan, pengkajian, dan pelaporan kondisi di Hapanevor.
4. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam akses dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi, seperti layanan online dan mobile untuk masyarakat.



BAB IV berisi:

1. Kesimpulan
2. Langkah Pelebaran Kinerja

## BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

LKIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Purwosari, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Purwosari pada tahun 2025 adalah sangat baik karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi. Meskipun dengan sumber daya manusia dan anggaran yang



terbatas, Kapanewon Purwosari tetap berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kaurnahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi urusan kolaborasi di kalurahan pada wilayah kapanewon dengan sebaik-baiknya.

Dari evaluasi dan analisa atas pencapaian sasaran strategis yang sudah dirumuskan dalam bab II, terlihat bahwa keaja keras telah dilakukan Kapanewon Purwosari untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun capaian kinerja setiap sasaran strategis telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Perekonomian dan Infrastruktur.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting digunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dimuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pjakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



## B. Langkah Perbaikan Kinerja

---

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Implementasikan sistem monitoring real-time untuk secara kontinyu memantau capaian indikator kinerja dengan platform teknologi informasi dan media sosial dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data secara efisien.
3. Membangun mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait layanan publik dan kebijakan Kapanewon melalui survei kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/media sosial untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon.
5. Secara berkala melakukan retrospektif untuk mengevaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.



## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja Kaparewon Perwosari Tahun 2025 beserta perubahannya
2. Laporan Hasil Evaluasi LKIP Kaparewon Perwosari Tahun 2024
3. Tanggapan/insak lanjut Evaluasi LKIP Kaparewon Perwosari Tahun 2024
4. Capaian Keuangan Dan Capaian Risiq Program Dan Kegiatan Kaparewon Perwosari Tahun 2025



**Kapanewon Purwosari**  
**Kabupaten Gunungkidul**  
2026



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

WILAYAH KOTA PURWOSARI

Jalan Raya Purwosari, Petyan, Girih: Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55713  
Ponsel : 0271-835001, 0271-835010, 0271-835011, 0271-835012, 0271-835013, 0271-835014, 0271-835015, 0271-835016, 0271-835017, 0271-835018, 0271-835019, 0271-835020, 0271-835021, 0271-835022, 0271-835023, 0271-835024, 0271-835025, 0271-835026, 0271-835027, 0271-835028, 0271-835029, 0271-835030, 0271-835031, 0271-835032, 0271-835033, 0271-835034, 0271-835035, 0271-835036, 0271-835037, 0271-835038, 0271-835039, 0271-835040, 0271-835041, 0271-835042, 0271-835043, 0271-835044, 0271-835045, 0271-835046, 0271-835047, 0271-835048, 0271-835049, 0271-835050, 0271-835051, 0271-835052, 0271-835053, 0271-835054, 0271-835055, 0271-835056, 0271-835057, 0271-835058, 0271-835059, 0271-835060, 0271-835061, 0271-835062, 0271-835063, 0271-835064, 0271-835065, 0271-835066, 0271-835067, 0271-835068, 0271-835069, 0271-835070, 0271-835071, 0271-835072, 0271-835073, 0271-835074, 0271-835075, 0271-835076, 0271-835077, 0271-835078, 0271-835079, 0271-835080, 0271-835081, 0271-835082, 0271-835083, 0271-835084, 0271-835085, 0271-835086, 0271-835087, 0271-835088, 0271-835089, 0271-835090, 0271-835091, 0271-835092, 0271-835093, 0271-835094, 0271-835095, 0271-835096, 0271-835097, 0271-835098, 0271-835099, 0271-835100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos., MP.

Jabatan : Panewu Purwosari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
SUNARYANTA

Widyasari, 6 Januari 2025  
Pihak Kesatu  
  
BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos., MP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PURWOGARI

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Sekolah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon	Indeks	79,68
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Jumlah Potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi	2

No	Sesuan Strategic	Indikator Kinerja	Target	
			Sekolah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	79,68
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nla AKIP PD	Indeks	88,48
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Jumlah Potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi	2

No	Program	Anggaran setelah Perubahan	Kelompok
1	Program Penyelenggaraan Kelembagaan Tiyakora Uluwu Kabupaten	Rp. 60.000.000,00	DAIS
2	Program Penyelenggaraan Kelembagaan Tiyakora Uluwu Kelurahan Dan Kelurahan	Rp. 40.000.000,00	DAIS
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 45.725.000,00	APSD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 53.200.000,00	APSD
5	Program Koordinasi Kelangkaan Dan Kelangkaan Umum	Rp. 14.225.000,00	APSD
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 108.450.900,00	APSD
7	Program Pembinaan Dan Penguatan Pemerintahan Desa	Rp. 148.905.000,00	APSD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Koba	Rp/1.204.433.163,82	APSD
	Jumlah	Rp 1.728.021.083,82	

Watuasi, 6 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat*

Jalan Raya Purwosari, Pekon. Girito, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55873  
Fase: [panewon@gunungkidul.go.id](mailto:panewon@gunungkidul.go.id) | [www.gunungkidul.go.id](http://www.gunungkidul.go.id)

PERJUALAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNGKEM, S.ST., M.M.

Jabatan : Panewu Anom Purwosari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : BARYONO BUNANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Jabatan : Panewu Purwosari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwosari, 7 Januari 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,  
  
BARYONO BUNANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

  
SUNGKEM, S.ST., M.M.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PURWOSARI  
PANDU ANOM

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	4.287
1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Anggaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	5
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	6.847
1.4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	79.254
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	43
1.7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.254.433.183,52	APBD
1.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.521.000,00	APBD
1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 44.558.800,00	APBD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 34.858.497,00	APBD
1.4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.007.894.244,00	APBD
1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 21.999.100,00	APBD
1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 98.534.999,52	APBD
1.7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 35.078.520,00	APBD
Jumlah	Rp. 1.254.420.180,52	

Parwisata, 7 Januari 2025



BARYONO BUNING PRASETYO, S.Sos.,MP.

Pihak Kesatu,

SUNGKEM, S.ST., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

INDONESIA 70301 Purwokerto - 021 3344 015

Jalan Raya Purwosari, Petyan, Giriboa, Purwodadi, Gunungkidul Kode Pos 55773  
Email : purwokerto@gunungkidul.go.id, Laman : purwokerto.gunungkidul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR HUDA, SST.

Jabatan : Kepala Jajaran Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : BARYONO BUANG PRASETYO, S.Soc.,MP.

Jabatan : Ponevu Purwosari

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengantail tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,

MUHAMMAD NUR HUDA, SST.



BARYONO BUANG PRASETYO, S.Soc.,MP.

LAMPIRAN PERJUMBUAN KINERJA TAHUN 2025  
 KAPANEWON PURWOSARI  
 KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM

No.	Tasiran Strategi	Indikator Kinerja	Target	
			Sasaran	Jumlah
1	1	2	4	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Jumlah Laporan Peringatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 5.000.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 5.000.000,00	

Purwokerto, 7 Januari 2025



Pihak Kedua

BARYONO SEANG PRASETYO, S.Sos, MP.

Pihak Ketiga

MUHAMMAD RIZKI HUDA, SST.



FEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kabupaten Gunungkidul - Purwosari*

Jalan Raya Purwosari, Pehyan, Girinta, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55873  
Email : purwosari@kab.go.id Gunungkidul.Lamar : purwosari@kab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINARNE ASNAH, S.Soc.

Jabatan : Kepala Jajaran Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : BARYONO BUANG PRASETYO, S.Soc.,MP.

Jabatan : Plarow Purwosari

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengantail tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwosari, 7 Januari 2025

Pihak Kesatu,

WINARNE ASNAH, S.Soc.



BARYONO BUANG PRASETYO, S.Soc.,MP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025  
KAPINEMWON PURWOGARI  
KEPALA JAWATAN KEMAMURAN

No	Saaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Azalia Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten meningkat	Jumlah Dokumen Sinchronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembentukan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	6
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembentukan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Dokumen Laporan Pengantalan dan Evaluasi Dana Kulimawean	Dokumen	1
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Kulimawean Tingkat Kabupaten tahun 2027	Dokumen	1

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Kef
1	Pelatihan Keterbacaan dan Kelembagaan Karangmas	Rp. 45.000.000,00	DAS
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakui oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 15.991.000,00	APSD
3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 33.000.000,00	APSD
4	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 3.891.000,00	APSD
	Jumlah	Rp. 97.882.000,00	



BARYOND BUANG PRASETYO, S.Sos., MP.

Purwokerto, Januari 2025

Ahok Keadu.

WINARN ASMAH, S.Sos.



FEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat*

Jalan Raya Purwasari, Pehyan, Girinta, Purwasari, Gunungkidul Kode Pos 55873  
Email : purwasari@kab.go.id Gunungkidul.Lanet : purwasari.kab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PRAMANA, S.H., M.AP.

Jabatan : Kepala Jajaran Keamman

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Jabatan : Panwa Purwasari

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Purwasari, 7 Januari 2025

Pihak Kesatu,

AGUS PRAMANA, S.H., M.AP.

LAMPIRAN PERUNJUKAN KERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PURWOKASRI  
KEPALA JAWATAN KEAMANNAN

No	Isuarea Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Kualiti Penyelenggaraan Pencerintahan Kepanawon meningkat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kaputusan Negara Republik Indonesia, Tertarik Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kemandirian Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Persepsi, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bincang Tanggapi ke 670 Pemertahanan dan Pemertasaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
		Jumlah Dokumen Tugast Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Kekerifan dan Keterlibatan Umum	Dokumen	1

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Berkas dengan Kecelesan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Internal Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 4.225.000,00	APBD
2	Pertemuan Kelembagaan Kebangsaan dan Kebharian Nasional dalam rangka Memartapkan Pangepatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhorosa Tunggal ka serta Pemerintahan dan Pampelhanan Kaakutan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 93.252.000,00	APBD
3	Pelaksanaan Tappa Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 10.200.000,00	APBD
4	Fasilitas Penyelenggaraan Kelembagaan dan Keaktifan Uraan	Rp 96.736.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 102.412.999,00	



BARYONG BLIMBING PRASETYO, S.Sos., MP.

Pewakat: Januari 2025

Prabu Prasanna

AGUS PRASANNA, S.H., M.A.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat*

Jalan Raya Purwasari, Pehyan, Girinta, Purwasari, Gunungkidul Kode Pos 55873  
Email : purwasari@kab.go.id Gunungkidul.Lamar : purwasari@kab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNGKEM, SST.MM.

Jabatan : Plt Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Jabatan : Pltewu Purwasari

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Purwasari, Januari 2025  
Pihak Kedua  
  
SUNGKEM, SST.MM.

LAMPIRAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PURWOSARI  
KEPALA JAWATAN SOSIAL

No	Saaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Pewestaran potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Gelar seni budaya dalam rangka peringatan hari kemerdekaan DIY	Even	1
2	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten meningkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2
		Jumlah Lomba Komunitas yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lomba	4
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
		Jumlah Laporan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Rel
1	Dasar-Biaya Jajin	Rp. 60.000.000,00	DAU
2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 49.735.000,00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 11.690.000,00	APBD
4	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 10.000.000,00	APBD
5	Facilitasi Sinergis/Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 88.215.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 219.640.000,00	

Purwokerto, Januari 2025



Pihak Ketua,

BARYOND BUNNO PRASETYO, S.Sos.,MP.

Pihak Ketua,

SUNGKEM, EST.MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kabupaten Gunungkidul - Jawa Tengah*

Jalan Raya Purwasari, Pehyan, Girinta, Purwasari, Gunungkidul Kode Pos 55873  
Email : purwasari@kab.go.id Gunungkidul.Lamar : purwasari@kab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTOFA MURTAJI ROHMAT, S.E.

Jabatan : Kepala Jawatan Proji

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Jabatan : Panwos Purwasari

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



BARYONO BUANG PRASETYO, S.Sos.,MP.

Purwasari, Januari 2025

Pihak Kedua

MUSTOFA MURTAJI ROHMAT, S.E.

LAMPIRAN PERUMBUAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PURWOSARI  
KEPALA JAWATAN PRUSA

No	Isiuan Strategik	Indikator Kinerja	Target	
			Isiuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Kualiti Penyelenggaraan Pemerintahan Kepanawon menengah	Jumlah Dokumen yang Difaedilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen yang Difaedilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	14
		Jumlah Dokumen yang Difaedilitasi dalam rangka Pengiraan Keuangan Desa dan Penyediaan Isat Desa	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara Desa	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengiraan dan Pemberian Perangkat Desa	Dokumen	2

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 1.121.000	APBD
2	Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 2.775.000	APBD
3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aset Desa	Rp 8.865.000	APBD
4	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 2.293.000	APBD
5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Desa	Rp 2.095.000	APBD
6	Rekomendasi Penguatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.000.000	APBD
Jumlah		Rp 22.049.000	


  
 Pihak Kedua,  
**BARYONG SURYO PRASETYO, S.Sos.MP.**

Purabaya, Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
**MUSTOFA MORTAJER, S.E.**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keberlanjutan*

Jalan Raya Purwosari, Pethyan, Girinta, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55873  
Email: purwosari@gunungkidul.go.id Laman: purwosari.gunungkidul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARDAL, SP

Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SINGKEM, S.ST., M.M.

Jabatan: Panewu Anom Purwosari

Selaku alasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengantail tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SINGKEM, S.ST., M.M.

Purwosari, 7 Januari 2025

Pihak Kesatu,

PARDAL, SP.

LAMPIRAN DELAPAN KINERJA TAHUN 2025  
KAMANEWON PURWOSARI  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM

No	Esensi Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Meningkatkan Nuisance-free Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10
		Jumlah Dokumen Perbaikan dan Pengaturan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadatkan	Paket	4
		Jumlah Paket Perbaikan dan Peralaksanaan Kantor yang Diadatkan	Paket	0
		Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Diadatkan	Paket	4
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Diadatkan	Paket	2
		Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	Laporan	10
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rasio Koordinasi dan Kinerja SKPD	Laporan	16
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	paket	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Laporan	36
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	unit	40
		Jumlah Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	141
		Jumlah Pemeliharaan Perawatan dan Merak Lainnya	unit	16
		Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Diadatkan/Dinhabilitasi	unit	24
		Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadatkan/dinhabilitasi	unit	0

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Kabupaten
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.300.000,00	APSD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Keuangan	Rp 35.078.000,00	APSD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.000.000,00	APSD
4	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Rp 13.907.000,00	APSD
5	Penyediaan Peralatan Kumpul Tamu	Rp 3.301.400,00	APSD
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Rp 1.500.000,00	APSD
7	Kegiatan Kunjungan Tamu	Rp 2.400.000,00	APSD
8	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 4.500.000,00	APSD
9	Pengadaan Mebel	Rp 3.600.000,00	APSD
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.764.800,00	APSD
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 34.000.000,00	APSD
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya/IT dan Lain-lain	Rp 21.969.100,00	APSD
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Rp 42.100.000,00	APSD
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3.200.000,00	APSD
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 42.334.000,00	APSD
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 500.000,00	APSD
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10.000.000,00	APSD
	Jumlah	Rp 337.527.600,00	

Purwokerto, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUNCKEM S. ST., M.M

Pihak Kedua,

PARDAL, S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat*

Jalan Raya Purwosari, Pethayu, Girinta, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55473  
Email: purwosari@kab.go.id Gunungkidul, Lantai: purwosari@kab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK TANTAWA, A.Md.

Jabatan: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNGHEM, S.ST., M.M.

Jabatan: Penerima Anon Purwosari

Selaku alasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengantail tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNGHEM, S.ST., M.M.

Purwosari, 7 Januari 2025

Pihak Kesatu,

DIDIK TANTAWA, A.Md.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON PURWOSARI  
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	9
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
		Jumlah Orang yang Menemuka (a) dan Turunjang ASN	Orang/Bulan	224
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp 3.000.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Rp 1.000.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 521.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 1.000.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp 500.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bidang Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.000.000,00	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.002.384.244,00	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 1.500.000,00	APBD
9	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 4.000.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 1.016.905.244,00	

Purwokerto, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUNGHEM, S.ST., M.M.

Pihak Kesatu,

DIDIK TAMTAMA, A.M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

Jalan Pahlawan Purwokerto, Desa, Purwokerto, Gunungkidul, Jawa Tengah 55851  
Telp. (0271) 8220000 Fax. (0271) 8220000

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berwenang dengan ini memberitahukan:

Nama : SUBYANTORO, S.P.  
Jabatan: Perwasi Pusekran  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ENDAH SUBEkti-KUNTARININGSIH, S.E., M.P.  
Jabatan: Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wagasan, 11 Oktober 2025

Pihak Kedua  
  
ENDAH SUBEkti-KUNTARININGSIH

Pihak Kedua  
  
SUBYANTORO

LAMPIRAN PERENCANAAN PERJALANAN KERJA TAHUN 2023  
KAPANTEN PUNJIDHAR

No	Tujuan Kegiatan Dasar	Indikator Tujuan Kegiatan Dasar	Target	
			Sasaran	Jumlah
(01)	(02)	(03)	(04)	
1	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanteh yang Berkualitas	Indeks Kelembagaan Pelayanan Kapanteh	Kualitas	100%
2	Pemertanian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Jumlah Potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sasaran	Achiev
(01)	(02)	(03)	(04)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanteh yang optimal	Indeks Pelayanan Kapanteh	Kualitas	90,75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Daerah	Nilai AKIP PD	Kualitas	80,00
3	Pemertanian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Jumlah Potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi	2

No	Program	Anggaran awal Persebut	Kategori
1	Program Penyelenggaraan Kelembagaan Yogyakarta Ular Keludayan	Rp. 30.000.000,00	DAS
2	Program Penyelenggaraan Kelembagaan Yogyakarta Ular Keludayan Berkolaborasi	Rp. 25.000.000,00	DAS
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.700.000,00	APSD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perikanan	Rp. 48.700.000,00	APSD
5	Program Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan Ular	Rp. 2.200.000,00	APSD
6	Program Penyelenggaraan Ular Pemerintahan Ular	Rp. 98.200.000,00	APSD
7	Program Pemertanian dan Pengembangan Pemerintahan Desa	Rp. 108.000.000,00	APSD
8	Program Penyelenggaraan Ular Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 1.200.000.000,00	APSD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.657.500.000,00</b>	

Widyadarmas, 10 Oktober 2023





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

INSPEKTORAT DAERAH  
Jalan Tanih Blah 28 Wiroan-Gunungkidul 55312

Telpon (0274) 391633 Faksimili (0274) 391636

Page: [inspektord@pemerintah.kab.go.id](mailto:inspektord@pemerintah.kab.go.id) | [www.pemerintah.kab.go.id](http://www.pemerintah.kab.go.id)

Wiroan, 14 Maret 2023

Nomor : 346-1-3-3/PEW-LYT/23  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
Internal pada Kabupaten Puncalon  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul  
di  
Wiroan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelebaran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2023 tentang Pedoman Teknik Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 001.8.7.3/2023, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 010/DA-IV/LK/11/2023 tanggal 5 Maret 2023, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kabupaten Puncalon Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilaksanakannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### 3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- menentukan arah perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### A. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas pemerintahan kinerja yang sebesar yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang bermaknaberkualitas;
- penilaian penguasaan kinerja berjangka dan berkelanjutan yang telah menjadi ketahanan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaksanaan kinerja yang menggambarkan kualitas atau pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SIPKIP untuk efisiensi dan efektivitas kinerja.

#### B. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemudahan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan indeks pemenuhan dokumen, kualitas dan pemeliharaan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AAAGBBBCCDDC, gambaran kerinci sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

##### a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam pelaksanaannya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam pelaksanaannya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>70% - 100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 70%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>20% - 50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0% - 25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

#### b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang layak ditiru dan pemenuhan kriteria terlewat
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%), sesuai dengan manfaat konjungsi nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>70% - 100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 70%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>20% - 50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0% - 25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan tadi dalam penentuan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terkumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dan penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori/profil sebagai berikut.

Profil	Interpretasi
AA (Nilai >100-120)	Sangat Memuaskan Terdapat gambaran tentang Sistem Pemerintahan Seluruh negara ditinjau dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang drama, adaptif, dan efisien (Rafsanjani) Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintahan kerja dapat memenuhi peraturan dalam menjalankan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level satuan/Departemen/Divisi/Unit kerja.
BB (Nilai > 60 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akutabilitas yang sangat baik ditanda dengan sudah terwujudnya efisiensi pengumpulan anggaran (dalam mencapai angka), memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level satuan/Departemen.
B (Nilai > 40 - 60)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja khususnya pada unit kerja utama. Terdapat masalah yang akanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam pelaksanaan kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level satuan/Unit kerja.

Prekual	Interpretasi
CC (Nilai > 80 - 100)	Cukup (Memasa) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendesak khususnya dalam hal-hal yang tertera pada uraian hasil.
C (Nilai > 70 - 80)	Kurang Beberapa dan beberapa aspek AKIP kurang dapat diandalkan. Belum sepenuhnya aspek manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan terutama di level pusat.
D (Nilai > 5 - 70)	Sangat Kurang Sistem dan standar dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum tercapai aspek manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak pembenahan/peningkatan yang sangat mendesak khususnya dalam implementasi AKIP.

#### E. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kaparewon Purworejo Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kaparewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kelengkapan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kaparewon. Kaparewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kabupaten serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan penyelenggaraan urusan Keselamatan & Kesehatan pada wilayah Kaparewon.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhususan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

**D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/00 tanggal 17 Juli 2024 dan dokumen yang dilampirkan, Kaparewco Purwokerto telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

**B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi AKIP internal Kaparewco Purwokerto Kabupaten Garungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,77 dengan profil A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkoat Daciah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon APengawas/Subkoordinat.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,25	24,31
2. Pengukuran Kinerja	30	25,10	24,22
3. Pelaporan Kinerja	15	12,75	11,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,65	61,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Perubahan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kaparewco Purwokerto Kabupaten Garungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**1. Perencanaan Kinerja**

Kaparewco Purwokerto Kabupaten Garungkidul telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana

Pendangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan kinerja antara lain terdapat yang diabaikan dalam Perencanaan Kinerja pada sasaran strategis berupa mengikutinya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja berupa nilai AKIP PD kurang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pertanggung jawaban pemantauan Realisasi tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 80,80 sedangkan target Tahun 2024 sebesar 80,30.

## 2. Pengukuran Kinerja

Kapitowon Purosoan Kabupaten Garungkidu telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain data kinerja yang disajikan belum inovatif (representatif) dengan kinerja (asaserti atau kendali yang akan diwujudkan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu pada indikator Nilai AKIP PD, terdapat dalam laporan target 80,30 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan terdapat target 80,70.

## 3. Pelaporan Kinerja

Kapitowon Purosoan Kabupaten Garungkidu telah menyajikan laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyusunan, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan data penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan kinerja antara lain Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan pertbandingan nilai-nilai kinerja dengan target tahunan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) belum mengacu pada rata-rata perjanjian kinerja perubahan yaitu sesuai dalam laporan target 80,30 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan nilai target 80,70.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemeriksaan tidak hanya hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk petakan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

### **E. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Pemuka Pimpinan Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/komunikasikan untuk petakan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

#### **1. Perencanaan Kinerja**

Melakukan review dan petakan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis pada periode selanjutnya sesuai dengan tata cara perencanaan.

#### **2. Pengukuran Kinerja**

Melakukan keelastikan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertbandingan capaian kinerja yang sesuai dalam laporan.

#### **3. Pelaporan Kinerja**

Melakukan keelastikan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perjanjian dalam laporan.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Tidak terdapat rekomendasi.

## A. PENUTUP

### 1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang telah sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkolaborasi dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

### 2. Apresiasi

Inspektoral Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kaparewot Puvowari Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Ditikkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kaparewot Puvowari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.



### Tembusan

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Puvowari Puvowari Kabupaten Gunungkidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Kapanewon Purwosari*

Jalan Raya Purwosari, Purabaya, Candi, Purwosari, Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul  
Telp. : 0271-8622193/0271-8622194/0271-8622195/0271-8622196/0271-8622197

Purwosari, 1 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/41/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) bendel  
Hal : Tiga Lajur LHE AKP

Yth. Inspektur Daerah  
Kabupaten Gunungkidul  
di  
Purwosari

Merujuk pada surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 700.1.2.7/41-LK/SP/040 tanggal 25 Mei 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan periksa.

  
Bambang Dwi Prasetya

Bambang Dwi Prasetya, S.Sos, M.P.  
Pembina Tk. I/MS  
NP 1571682154331104

Lampiran I  
Garis

Nomor : Y00-1.2.7.3.02025  
Tanggal : 7 Juli 2025

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHS) AKAP INTERNAL TAHUN 2024  
PADA KAPARTYON PURWOSARI

No.	Komponen/Catatan	Maknawadai	Dua) Tindak Lanjut yang diuraikan	Dua) Tindak Lanjut yang diuraikan	Status Tindak Lanjut
1.	<p>PERENCANAAN KEGIATAN</p> <p>target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada sasaran strategis berupa metriknya, diantaranya seperti Peringkat Casuar dengan indikator kinerja Service Unit AKAP PD yang meningkat. Hal tersebut dapat dilat dan dilatize tahun berikutnya dalam laporan kinerja tahun berikutnya akan melalui perencanaan tahun atau seluruhnya (tahun 2022) sebagai B.O.BE sedangkan target Tahun 2024 sebesar 80,30.</p>	<p>Melihat dari deskripsi perubahan perencanaan kinerja untuk menetapkan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), dan realistic, dan pada periode sebelumnya</p>	<p>1. Revisi perencanaan kinerja tahun 2024 2. Percepatan Target Kinerja dalam tahun perencanaan Tahun 2025 yang dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis</p>	<p>1. Revisi perencanaan kinerja dalam LUGP 2024 2. Percepatan Target Kinerja dalam tahun perencanaan Tahun 2025 yang dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis</p>	<p>Tindak Lanjut</p>

No.	Komponen/Contohnya	Pembahasan	State Tidak Layak yang dipertahankan	Waktu Usuk Layak yang dianggap	Status Tingkat Layak
3.	<p><b>PELAKSUKAN KINERJA</b></p> <p>data kinerja yang dihasilkan belum memiliki (representatif) dengan kinerja tahunan atau bulanan yang akan ditunjukkan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) belum menggunakan data pada pelaksanaan kinerja yang pertambahan nilai pada indikator nilai JCRP (JL, KEM) untuk laporan target 06.16 sehingga dalam perjanjian kinerja pertambahan nilai target 06.16</p>	<p>Membahas bagaimana data kinerja yang nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertambahan nilai kinerja yang harus dalam laporan.</p>	<p>Surat Perencanaan Kapasitas Pengalihan Daerah untuk meniadakan kesenjangan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	<p>Surat Kesanggupan Kapasitas Pengalihan Daerah untuk meniadakan kesenjangan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	<p>Tidak layak dalam proses penyelesaian sesuai kebutuhan.</p>
3.	<p><b>PELAKSUKAN KINERJA</b></p> <p>Diburuk Laporan Kinerja telah menginformasikan pertambahan nilai kinerja dengan target tahunan, target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) belum menggunakan data pada pelaksanaan kinerja pertambahan nilai target 06.16 sehingga dalam perjanjian kinerja pertambahan nilai target 06.16</p>	<p>Membahas bagaimana data kinerja yang nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertambahan nilai kinerja yang harus dalam laporan.</p>	<p>Surat Kesanggupan Kapasitas Pengalihan Daerah untuk meniadakan kesenjangan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	<p>Surat Kesanggupan Kapasitas Pengalihan Daerah untuk meniadakan kesenjangan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>	<p>Tidak layak dalam proses penyelesaian sesuai kebutuhan.</p>

No.	Komponen/Capaian	Revisi/Detail	Basis Tidak Lulus yang diperlukan	Basis Tidak Lulus yang diajukan	Status Tindak Lanjut
4	Tidak terdapat subbab yang membahas evaluasi	EVALUASI AKUNTABILITAS KEMAJAAN BERKUALITAS			



Dikryono Suing Priocriyo, S. Sos., M.P.P.  
 Pembina T.K.I. Sub  
 NIP. 197105021963201004







PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI

*Wibawa, Aman, Berkualitas, Berkeadilan*

Jalan Raya Purwasari, Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Gunungkidul 55111  
Telp : 0271-80218000/0271-80218004, Fax : 0271-80218000/0271-80218004

BURAT PERNYATAAN KEMAMBUHAN

Bertolak dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Purwasari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Inspektori Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beryoni Buang Prasetyo, S.Sos, M.I.P

NIP : 1971902180001004

Jabatan : Pemawa Purwasari

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menandatangani Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dibenarkan oleh Inspektori Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Kapanewon Purwasari Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di mana yang akan datang menyusun dan menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi secara tepat waktu kepada Bagian Organisasi;
2. Memberikan penjelasan yang memadai atas pelanggaran realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-sebelumnya dalam dokumen Laporan Kinerja;
3. Menyajikan upaya nyata yang telah dilakukan Kapanewon dalam mencapai target kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja;
4. Dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja selanjutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwasari, 2 Juli 2025

Pemawa Purwasari

Beryoni Buang Prasetyo, S.Sos, M.I.P  
Pemawa T.1. 7/25  
NIP. 1971902180001004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Taman Bhakti 28 Wonorejo Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391536, Faksimili (0274) 391538

Email: inspektord@kemungkidul.kab.go.id Laman: inspektorgunungkidul.go.id

Wonorejo, 4 Juli 2025

Nomor : Dit - 2 - 7 / T<sub>1</sub> - AH / JIV  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tidak  
Lengkap Laporan Hasil Evaluasi  
(LHE) AKP Internal Tahun 2024  
pada Kaparewon Purwasari  
Kabupaten Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul  
di  
Wonorejo

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 325/KPT/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektori Daerah Tahun 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/104-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tidak lengkap LHE AKP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Kaparewon Purwasari Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tidak lengkap LHE AKP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan patokan.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan
2. Penerima Puncak.

HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024  
 PADA KAPANEWON PURWOSARI

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang diupayakan	Status Tindak Lanjut
1.	<p><b>PERENCANAAN KINERJA</b></p> <p>target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada sasaran strategis berupa kewilayahannya secara menyeluruh dengan indikator kinerja berupa nilai AKIP PD kurang meriang. Hal tersebut dapat dilihat dan modifikasi tahun sebelumnya dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimasukkikan untuk perbaikan perencanaan. Realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 80,60 sedangkan target tahun 2024 sebesar 85,30</p>	<p>Melakukan review dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang dapat dicapai (achievable), dan realistis pada sebayanya</p>	<p>1. Realisasi pencapaian Kinerja dalam LKJP 2024</p> <p>2. Penetapan Target Kinerja dalam dokumen perencanaan Tahun 2025 yang dapat dicapai (achievable), meriang dan realistic.</p>	<p>1. Realisasi pencapaian Kinerja dalam LKJP 2024</p> <p>2. Penetapan Target Kinerja dalam dokumen perencanaan Tahun 2025 yang dapat dicapai (achievable), meriang dan realistic.</p>	<p>Tindak lanjut dilaksanakan sesuai rekomendasi</p>

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang dipertanyakan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
2.	<p>PENGURURAN KINERJA</p> <p>data kinerja yang disajikan belum mewakili dengan (representatif) dengan kinerja (pemeran) atau kondisi yang akan diwujudkan. Target kinerja yang digambarkan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) bahwa menggunakan data pada perjanjian kinerja pendanaan yaitu pada Indikator Nilai AKUP PC, teruji dalam laporan target 80.33 sedangkan dalam perjanjian kinerja kinerja pendanaan teruji target 80.73</p>	<p>Mempastikan konsistensi data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertanggung capaian kinerja yang teruji dalam laporan.</p>	<p>Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan konsistensi data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertanggung capaian kinerja yang teruji dalam laporan</p>	<p>Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan konsistensi data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertanggung capaian kinerja yang teruji dalam laporan</p>	<p>Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi</p>
3.	<p>PELAPORAN KINERJA</p> <p>Durasi Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan nilai nilai kinerja dengan target tahunan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam</p>	<p>Mempastikan konsistensi data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertanggung capaian kinerja yang teruji dalam laporan.</p>	<p>Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan konsistensi data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertanggung capaian kinerja yang teruji dalam laporan</p>	<p>Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan konsistensi data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan pertanggung capaian kinerja yang teruji dalam laporan</p>	<p>Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi</p>

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindakan Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindakan Lanjut yang diajukan	Status Tindakan Lanjut
	<p>Laporan belum menggunakan data pada perjanjian kinerja pendanaan yaitu berkali dalam laporan target 80,30 sedangkan perjanjian kinerja pendanaan terdapat target 80,70</p>				
4.	<p><b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>            Tidak terdapat catatan hasil evaluasi</p>	<p>Tidak ada rekomendasi</p>			











Sl. No.	Name of the Candidate	Registration No.	Date of Birth	Mentorship		Mentorship		Mentorship		Total	Grade
				Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank		
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...







PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

www.sadaperencanaan.kab.go.id

Jl. Satrio No. 1, Wonorejo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telp: (0274) 391721, Faksimile : (0274) 391721

Laman : [keppada@gunungkidul.go.id](mailto:keppada@gunungkidul.go.id), [keppada@gunungkidul.go.id](mailto:keppada@gunungkidul.go.id)

**BERTASACARA**

Nomor : 003.7.2.4/2022/2022

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE  
 NIP : 196905311991031003  
 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IIIA  
 Jabatan : Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi  
 Alamat : Sappeoda Kabupaten Gunungkidul  
 yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : DIDIK TAMTAMA, A.Md  
 NIP : 198412212010011014  
 Pangkat/Gol : Pembina Muda Tk. I, IIB  
 Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan  
 Alamat : Kecamatan Purwasari  
 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan IV Tahun 2022 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 11.848.892.098,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2022 Rp 6.286.305.045,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2022 sebesar Rp 1.857.685.894,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 191,25%
- e. Capaian keuangan RKPD 2022 sebesar 84,53% atau Rp 1.405.472.440,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 80,25%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 65% atau Rp 7.702.478.085,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

DIDIK TAMTAMA, A.Md  
 Pembina Muda Tk. I, IIB  
 NIP. 19841221201011014

Pihak I  
 Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE  
 Pembina Tingkat I, IIIA  
 NIP. 196905311991031003



CHARUL AGUS MANTARA, S.P., MM  
 Pembina Tingkat I, IIB  
 NIP. 197206201902031025



**Kapanewon Purwosari**  
**Kabupaten Gunungkidul**  
**2026**